

## **Agenda Setting Rencana Pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera**

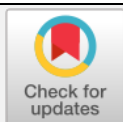
**Zilna Monika Audia<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Sarpin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung

\*Korespondensi: [zilnamonica1997@gmail.com](mailto:zilnamonica1997@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

**Info Publikasi:**  
*Research Article*



**Dikirim: 7 Juli 2023;**  
**Diterima: 8 Agustus 2023;**  
**Dipublikasi: 29 September 2023;**



**Copyright © 2023. Owned by**  
**Author(s), published by JSC**

***This is an open-access article.***  
***License: Attribution-***  
***NonCommercial-ShareAlike (CC***  
***BY-NC-SA)***

#### **How to cite:**

Zilna Monika Audia, Ibrahim, Sarpin. 2023. *Agenda Setting Rencana Pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera. Journal of Social Contemplativa*. 1(2); 100-112

### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “*Agenda Setting* pembangunan jembatan Bangka-Sumatera” ini berfokus kepada beberapa kepentingan dari sisi ekonomi, sisi *social*, dan sisi politik. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian bahwa *Agenda setting* merupakan suatu program yang dilakukan pemerintah Bangka Belitung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung seperti inflasi di Bangka Belitung ini yang menjadi salah satu latar belakang untuk meningkatkan perekonomian di Bangka Belitung dengan memberikan *alternative* kebijakan seperti membangun Jembatan Bahtera Sriwijaya, dimana Jembatan tersebut sepanjang 13,5 kilometer yang berlokasi di Desa Sebagian Bangka Belitung. Dari memberikan *altenative* kebijakan, pemerintah daerah Bangka Belitung memberikan tindakan kebijakan seperti memberikan kebijakan dalam pembangunan jangka panjang dengan membuat Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (PERDA RTRW). Lalu hasil dari kebijakan tersebut belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya karena keterbatasan anggaran karena dalam pembuatan jembatan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat tinggi, lalu masyarakat juga masih memikirkan dampak negative dari adanya jembatan itu nanti seperti kriminalitas, budaya dan kecelakaan lalu lintas. Sejak di lakukan nya uji kelayakan sampai saat ini belum ada proses yang signifikan terhadap jembatan tersebut. Artinya dalam pembangunan di daerah memerlukan *agenda setting* yang harus meilihat sisi dari kepentingan ekonomi, kepentingan social dan kepentingan politik didalamnya

**Abstract** The research entitled "Agenda Setting for the construction of the Bangka-Sumatra bridge" focuses on several interests from the economic, social and political sides. The research method in this writing is descriptive qualitative research. The results of the research show that the Agenda setting is a program carried out by the Bangka Belitung government to solve problems that occur in Bangka Belitung, such as inflation in Bangka Belitung, which is one of the backgrounds to improve the economy in Bangka Belitung by providing alternative policies such as building the Sriwijaya Ark Bridge, where the bridge is 13.5 kilometers long which is located in Sebagian Village, Bangka Belitung. From providing alternative policies, the local government of Bangka Belitung provides policy actions such as providing policies for long-term development by making Regional Spatial Planning Regulations (PERDA RTRW). Then the results of this policy could not be carried out as it should be due to budget constraints because the construction of the bridge required a very high budget, then the community was also still thinking about the negative impacts of the bridge later such as crime, culture and traffic accidents. Since the feasibility test was carried out, until now there has been no significant process for the bridge. This means that development in the region requires an agenda setting that must see the side of economic interests, social interests and political interests in it

**Kata Kunci:** *Agenda Setting*, Pembangunan Jembatan, Kepentingan Politik

## 1. Pendahuluan

Jembatan Bangka-Sumatera atau sering disebut dengan jembatan Bahtera adalah jembatan yang menghubungkan antara Bangka dan Sumatera. Jembatan Bahterah merupakan salah satu proyek pembangunan pemerintah dalam bidang infrastruktur. Pembangunan tersebut merupakan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jembatan Bahterah tersebut merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh dua provinsi tersebut. Tujuan pembangunan jembatan tersebut untuk memudahkan pada kelancaran arus barang dan manusia di Bangka juga Sumatera. Dari pembangunan tersebut juga bertujuan menjadi penghubung yang tak terkendala dan aksesibilitas yang lebih efektif. Rencana pembangunan jembatan Bahtera akan dibangun di daerah Selapan Sumatra Selatan sedangkan di Bangka Belitung akan dibangun di daerah Sebagian Kabupaten Bangka Selatan. Jarak antara Selapan dan Sebagian sekitar 13,5 Km. Pembangunan jembatan bahtera tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp 13 triliun. Anggaran tersebut berasal dari program strategi nasional (PNS). Jembatan penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan atau yang sering disebut jembatan bahtera terus dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan telah menyiapkan pembebasan lahan, untuk membuka akses jalan ketitik jembatan di Desa Sebagian. Dan dalam akses jalan tembusan Lingkar Barat akan dibuka, untuk menghubungkan lokasi titik jembatan bahtera di Desa Sebagian. Dari Desa Sadai, Rias, Pulau Besa, Batu Betumpang hingga Desa sebagian yang berjarak sepanjang 128 kilo meter.

Dalam rencana pembangunan jembatan bahtera pada tahun 2020 pemerintah provinsi Bangka Belitung dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan membentuk tim percepatan pembangunan sehingga akan mempercepat laju pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan tersebut harus lebih jelas. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah membuat kebijakan sesuai dan tepat dalam penyusunan kebijakan. *Agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang bisa menjadi strategi dalam kebijakan publik. Istilah *agenda setting* berasal dari dua kata kunci yaitu "*agenda*" dan "*setting*" (aktivitas penyiapannya). Menurut Santoso dalam Eki 2015 *Agenda setting* juga diartikan "pembuatan agenda" bisa dimaknai sebagai proses mengarahkan kebijakan melalui jendela-jendela kebijakan yang muncul sebagai akibat dari dinamika politik yang terjadi dalam proses *agenda setting*.

Jika dilihat dari *agenda setting* terkait dengan sisi ekonomi, sisi social dan sisi politik. Dapat dikatakan dalam segi ekonomi pembangunan jembatan bahtera ini memerlukan biaya anggaran yang tidak sedikit oleh karena itu proses pembangunan hingga saat ini terhenti dikarenakan kekurangan anggaran. Lalu dari sisi sosialnya, masyarakat umumnya yakni masyarakat Kepulauan Bangka Belitung lebih dominan menolak dibangunnya jembatan bahtera tersebut dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya tingkat kriminalitas, tingkat kecelakaan lalu lintas dan lain-lain yang bersifat negative. Lalu jika dilihat dari sisi politik nya dimana terdapat kepentingan politik didalamnya. Politik pembangunan dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan terhadap keperluan orang (masyarakat) atau kualitas para kinerja birokrat yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah mendesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang lebih baik seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya atau yaang disebut Peter Merkl: "Politik dalam suatu bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*) betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam hal itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai serta ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas *agenda setting* dari segi ekonomi, social dan politik dalam pembangunan bahtera sriwijaya ini.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penggunaan desain penelitian kualitatif deskriptif dinilai relevan untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan bagaimana proses pertimbangan aspek sosial-politik dalam rencana pembangunan jembatan Bangka-Sumatera tersebut oleh pemerintah Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2012). Penelitian kualitatif deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis, menggambarkan, dan menyimpulkan data temuan lapangan yang berupa hasil pengamatan atau wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa kabupaten Bangka Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan dapat dioptimalkan. Pada penelitian peneliti akan melakukan penelitian ini berlokasi di Desa Sebagin Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Peneliti lebih tertuju di Desa Sebagin karena adanya rencana pembangunan jembatan bahtera. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pemerintah daerah setempat dalam pembangunan jembatan bahtera yang menghubungkan antara Bangka dan Sumatera.

### Target/Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan masyarakat Desa Sebagin. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik yang penentuan sampel yang dilakukan atas suatu tujuan, melalui pertimbangan tertentu.

### Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Yang dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menggali data atau informasi dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda, atau rekaman gambar (Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian adalah aktor yang sedang melakukan, memainkan peran tertentu. Jadi pada penelitian ini aktornya adalah para pemerintah daerah yang berhubungan dengan pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera.

## 2. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tak berstruktur. Menurut Sugiyono (2016:233-234) wawancara tidak berstruktur adalah wawancara adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dalam memperoleh data. Berkaitan dengan ini peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah siap disampaikan menurut acuan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bisa berbentuk dokumen sebagai sumber data contohnya tulisan, gambar, arsip, grafis, foto-foto dan sebagainya. pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik pelaksanaan kegiatan penelitian melalui adanya foto-foto ataupun dokumen sebagai bukti fisik data yang diperoleh. Dokumentasi ini digunakan agar hasil dalam penelitian ini lebih dapat dipercaya atau kredibel.

## Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model data Miles dan Huberman. Yang mana menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga data yang diperoleh sudah jenuh.

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan cara mereduksi data yang berarti merangkum data yang diperoleh lapangan, memilih data yang pokok serta memfokuskan dengan hal yang berkaitan dan dianggap penting.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah selesai pada tahap mereduksi data, kemudian berlanjut pada langkah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, tahap ini dapat dilakukan berupa bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Tujuan dengan mendisplaykan data ini bisa memudahkan dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dimengerti.

### 3. Penarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pengambilan keputusan pada pertanyaan penelitian. Data yang disusun bisa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan sebagainya.

### 3. PEMBAHASAN

#### Agenda setting dalam rencana Pembangunan jembatan Bangka- Sumatera tersebut oleh pemerintah Bangka Belitung

Menurut Bernard C. Cohen dalam Andi Muhammad 2017, *Agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Oleh karena itu pemerintah Bangka Belitung membuat *agenda setting* seperti penemuan aliran masalah setelah itu permasalahan tersebut diberikanlah *altenative* kebijakan yang mana dari *alternative* tersebut pemerintah memberikan tindakan kebijakan lalu hasil dari kebijakan tersebut untuk pembentukan infrastruktur berupa jembatan Bangka-Sumatera sebagai berikut

#### 1. *Problem Stream* (Aliran Masalah)

Menurut Y. Purnomo dalam Andi Muhammad 2017, *Problem Stream* Merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi ditengahahtengah masyarakat. Agar sebuah isu dianggap sebagai permasalahan maka permasalahan ini harus dirasakan oleh orang banyak. Aliran permasalahan ialah hal-hal yang membuat pemerintah tertarik untuk menanggapi sebuah isu. Permasalahan inilah yang kemudian akan berkompetisi satu sama lain untuk dijadikan agenda Pemerintah. Tiga mekanisme yang membuat masalah menjadi perhatian pembuat kebijakan atau Pemerintah adalah indikator, peristiwa, dan umpan balik. Pada pembahasan ini adalah tahap pengidentifikasian masalah, dimana isu-isu mengenai masalah perbangunan tersebut yang muncul apakah menjadi perhatian dalam sebuah kebijakan atau malah sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa isu yang selalu muncul dalam agenda kebijakan. tahun 2019 Bangka Belitung menjadi inflasi tertinggi di Pulau Sumatera yang dikarenakan ongkos angkut yang cukup mahal karena berbeda pulau. Dengan demikian pemerintah mempunyai usulan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan guna megurangi inflasi dan memudahkan perekonomian masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, Penulis mampu menangkap kesimpulan yaitu bahwasanya dengan dibangun-nya jembatan bahtera



penghubung antara Sumatera dan Bangka Belitung memiliki peluang yang cukup besar untuk mendirikan Kawasan ekspor dan impor lebih mudah dan lebih tidak banyak mengeluarkan biaya untuk itu seperti kawasan industri karena jika dilihat Bangka Belitung disini adalah *center point* jika dilihat dari garis Vertikal sehingga beberapa bahan baku yang dikirim dari Sumatera dapat mengirimkan bahan baku ke Bangka Belitung, Sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung sangat optimis akan pembangunan Kawasan industri berupa jembatan penghubung ini.

Artinya banyak yang harus diperhatikan terkait dengan dampak positif dan dampak negative dengan dibuatnya jembatan Bahtera sebagai jembatan penghubung antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung. Bukan hanya itu, pembangunan ini juga harus mempertimbangkan aspek keuangan karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan keamanan proyek.

## 2. *Alternative kebijakan (policy alternatives)*

Permasalahan pembangunan infrastruktur hingga masalah inflasi mengagendakan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik guna memudahkan mobilitas perekonomian. Dikutip Dari webinar nasional jembatan bahtera Tahun 2020, Adapun rincian jembatan yang akan di bangun dalam hal ini sebagai berikut:

### a. Bahtera Sriwijaya

Jembatan yang diberi nama Jembatan Bahtera Sriwijaya itu akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Jembatan ini akan dibangun dengan menggunakan teknologi modern. Dengan Tiang jembatan yang tinggi, supaya tidak menghalangi jalur lalu lintas di laut.

### b. Lokasi di Sebagian dan Tanjung Tapa Kecamatan Tanjung Selapan

Dalam sejumlah pertemuan telah sepakati titik lokasi jembatan penghubung yaitu untuk Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terletak di Desa Tanjung Tapa Kecamatan Tanjung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel dan Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan.

### c. Memiliki Panjang 13,5 Km

Jembatan ini memiliki total panjang jembatan 15 Km. Dan telah disepakati akan berlokasi di Desa Tanjung Tapa Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel dan Desa Sebagian Kabupaten Bangka Selatan. Sehingga

menghubungkan Provinsi Sumsel dengan Provinsi Kepulauan Babel sepanjang 13,5 kilometer. Rencananya pada tahun 2024 sudah ada progres pelaksanaan pembangunannya. (Pdf Webinar Nasional Jembatan Bahtera)

Dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung adalah Sawit dan hasil panen lainnya, dengan adanya jembatan Bahtera ini akan mempermudah masyarakat menjual hasil kelapa sawit dan barang pokok lainnya langsung dapat dilakukan ke Provinsi Sumatera Selatan. dikarenakan Sudah ada jembatan jual buah sawit dapat diekspor ke Palembang, karena di dalam Babel komoditi kelapa sawit murah. Dimana tujuan akhir dari pembangunan tersebut adalah pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Diidentikkan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat dan dengan pembangunan konektivitas ini maka diharapkan akan terjadi kemudahan dan kelancaran mobilitas rakyat dalam bekerja dan berusaha, juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

### 3. Tindakan Kebijakan (*policy actions*)

Tindakan kebijakan yang direncanakan dari pemerintah adalah membuat peraturan tertulis. Dimana dengan adanya peraturan ini yang menjadi arahan struktur ruang dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.

### 4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Kebijakan perencanaan yang dicanangkan pemerintah masih ditahap uji kelayakan yang masih diajukan di Kementrian PUPR. Dikarenakan pembangunan ini memerlukan anggaran yang cukup tinggi maka hal ini masih dikaji oleh Kementrian PUPR terkait kelayakan finansial dan teknis proyek kementrian PUPR sedang mengkaji.

Jika dilihat dari teori *agenda setting*, *Agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut



berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam hal ini pembangunan jembatan bahtera yang hingga saat ini belum terselesaikan menjadi masalah public dan prioritas yang harus diselesaikan. Lalu isu ini masih belum menemukan titik terang dikarenakan dari kepentingan ekonomi dengan adanya pembangunan jembatan bahtera ini diyakinkan dapat menjadikan perekonomian di Bangka ini menjadi naik pesat dikarenakan dengan adanya jembatan bahtera ini, masyarakat dapat melakukan ekspor dan impor langsung ke berbagai daerah dengan hanya melintasi jembatan bahtera ini tetapi hal ini pula memerlukan biaya anggaran yang sangat tinggi sehingga membuat pemerintah pusat untuk memikirkan lagi apakah jembatan tersebut harus diteruskan yang mengakibatkan jembatan bahtera ini belum terselesaikan hingga saat ini.

Lalu dari kepentingan social, banyak masyarakat bangka yang menganggap bahwa dengan adanya jembatan bahtera ini akan meningkatkan kriminalitas di daerah bangka dan meningkatkan tingkat kecelakaan lalu lintas, hal ini terjadi karena pemerintah dan stakeholder yang berada di belakang pembangunan jembatan ini tidak melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait pembangunan jembatan ini.

Dan dari kepentingan politik, dapat dilihat bahwasanya para stakeholder yang membantu pemerintah daerah dalam pembangunan jembatan ini hanya memikirkan bagaimana daerah agar mendapatkan anggaran untuk melanjutkan program pembangunan tersebut, sedangkan pemerintah pusat sudah menghentikan sementara dan meninjau kembali terkait anggaran yang sudah dikeluarkan untuk uji kelayakan. Menurut Anderson dalam Nabila 2018 mengatakan bahwa aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni para pemeran secara resmi (*official actors*) adalah Aktor yg terlibat karena diberi tanggungjawab oleh undang-undang dan atau peraturan lainnya, sehingga mereka mempunyai legalitas untuk membuat dan memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan. Artinya dalam pernyataan tersebut, *agenda setting* ini bukan hanya terkait dengan kepentingan ekonomi, kepentingan social melainkan kepentingan politik juga. Dimana jika suatu kegiatan didasari sebuah kepentingan maka program tersebut akan terjadi kemacetan dan tidak berhasil.

## Kendala Rencana Pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera

a. Biaya Anggaran

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan jembatan Bahtera Sriwijaya yang menghubungkan antara Bangka dan Sumatera Selatan diperkirakan sekitar Rp15 Triliun. Hal itu juga belum final dapat berubah sewaktu-waktu. Melihat naiknya harga sejumlah barang kebutuhan

b. Perspektif Masyarakat

Dalam pembangunan diketahui akan memiliki dampak positif dan negatif serta pro-kontra di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah daerah agar melaksanakan studi kelayakan yang benar – benar dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan non teknis. Dengan adanya pembangunan ini muncul pula perspektif masyarakat bahwa dengan dibangunnya jembatan ini memang akan meningkatkan perkenomian di Bangka tetapi juga akan meningkatkan tingkat kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, Kedaulatan ekonomi dan budaya. Artinya Pemerintah Bangka perlu memberikan gambaran terkait cara yang nantinya akan mengantisipasi hal-hal negative yang akan merugikan masyarakat.

c. Terdapat kepentingan politik dalam pembangunan jembatan Bahtera

Dalam sebuah proses politik maupun proses-proses untuk mengambil sebuah keputusan selalu ada konflik antara pihak-pihak yang berupaya berkuasa atau mempertahankan sumber yang dianggap penting dan pihak-pihak lain yang juga ingin berkuasa atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Dalam proses politik berbagai kelompok maupun individu biasanya menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk berupaya keras memperjuangkan kepentingannya. Dalam ilmu-ilmu sosial mengenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural fungsional (konsensus) dan pendekatan struktural konflik.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas, bahwa diadakannya pembangunan jembatan bahtera ini diusulkan oleh Bapak Erzaldi Rusman untuk menarik perhatian masyarakat dikarenakan kepentingan politiknya untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, hal ini juga yang menjadi salah satu factor penghambat pembangunan-nya.

d. Rancangan yang dibuat membutuhkan waktu yang sangat lama

Sejak Tahun 2019 jembatan bahtera sriwijaya ini telah memasuki *fase Feasibility Study* dilakukan untuk mempelajari layak atau tidak layaknya jembatan tersebut dibangun, lalu menilai sisi ekonomis, serta keamanan apabila pembangunan tersebut dilaksanakan. Jika hasilnya layak maka akan ditentukan desain jembatan dan akan dilaksanakan pra studi yang dilakukan Kementrian PUPR. Oleh karena hal ini, pembangunan jembatan bahtera masih menunggu hasil persetujuan kelayakan dari Kementrian PUPR, dimana kementrian tersebut juga masih memperhatikan aspek kelayakan baik secara anggaran dan proyeknya. Dikarenakan anggaran yang sangat tinggi yang membuat pembangunan ini tidak berjalan dengan baik.

#### 4. SIMPULAN

*Agenda setting* merupakan suatu program yang dilakukan pemerintah Bangka Belitung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung seperti inflasi di Bangka Belitung ini yang menjadi salah satu latar belakang untuk meningkatkan perekonomian di Bangka Belitung dengan memberikan *alternative* kebijakan seperti membangun Jembatan Bahtera Sriwijaya, dimana Jembatan tersebut sepanjang 13,5 kilometer yang berlokasi di Desa Sebagin Bangka Belitung.

Dari memberikan *altenative* kebijakan, pemerintah daerah Bangka Belitung memberikan tindakan kebijakan seperti memberikan kebijakan dalam pembangunan jangka panjang dengan membuat Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (PERDA RTRW). Lalu hasil dari kebijakan tersebut belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya karena keterbatasan anggaran karena dalam pembuatan jembatan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat tinggi, lalu masyarakat juga masih memikirkan dampak negative dari adanya jembatan itu nanti seperti kriminalitas, budaya dan kecelakaan lalu lintas. Sejak di lakukan nya uji kelayakan sampai saat ini belum ada proses yang signifikan terhadap jembatan tersebut.

Artinya dalam pembangunan di daerah memerlukan *agenda setting* yang harus meilihat sisi dari kepentingan ekonomi, kepentingan social dan kepentingan politik didalamnya. Agar pemerintah Bangka untuk bisa melakukan peninjauan kembali terkait program pembuatan jembatan bahtera ini karena sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang signifikan.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini.

## 6. Pernyataan Conflicting Interests

Peneliti menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepengarangan, dan publikasi artikel ini.

## References

- Adisasmita Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Akib, Haedar, 2010. *"Implementasi Kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana"*. Universitas Negeri Makassar.
- Andi Heny Mulawati Nurdin & Agung Manghayu, 2016. *Perencanaan Pemerintah*. Kementerian Dalam Negeri Institut Pemerintah Dalam Negeri
- Cangara, Hafied, 2011. *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eki Darmawan & Achmad Nurmandi, 2015. *Agenda Setting Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol.2 No.3 2015
- Firmanzah, 2018. *"Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- FY Putri. 2022. *Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Persepektif Kebijakan*. Diakses pada: <https://journal.unismuh.ac.id>
- Harisson, Lisa, 2007. *Metode Penelitian Politik*, Kencana, Jakarta
- Ibrahim, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Kuncoro Mudrajad, 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- O Jones, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Bustami & Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*, Ubb Pers
- Nugraha Eka Prayudha, 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

- P. Rianto. 2010. *Opini Publik, Agenda Setting dan Kebijakan Publik*. Diakses pada: <https://journal.uui.ac.id>
- Puspita Ratih Indah. (2016). Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Setting Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW Oleh Industri CV. Evergreen Indogarment*.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sutanto Hidayat Dkk. 2020. *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik Belajar Dari Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu*
- Silichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi Ke Impelementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- T. Agustina. 2017. *Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Pembangunan*. Diakses pada: <https://ojs.unikom.ac.id>
- Taufiqurokham, 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers
- Wahyu Suprianto, 2018. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012*
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

---

### Tentang Penulis

**Zilna Monika Audia**, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

**Ibrahim**, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

**Sarpin**, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.